

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM
PENATAAN PASAR TRADISIONAL
(Studi Kasus Pada Pasar Sungai Danau Raya di Kabupaten Tanah Bumbu)

Hardiati¹, A.Nikhrawi Hamdie², Junaidy³

¹Ilmu Admistrasi Publik,6320, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kalimantan Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM. 17.12.0112

²Ilmu Admistrasi Publik,6320, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kalimantan Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN. 1105026401

³Ilmu Admistrasi Publik,6320, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kalimantan Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN. 1102088702

nengg.new@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah dilakukan saat ini dan Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Tanah Bumbu Metode penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah dilakukan saat ini dapat disimpulkan bahwa selama ini UPT. Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan pekerjaan dengan baik didukung dengan data yang lengkap serta pasar yang bersih dikelola dan pedagang sudah merasakan akan nyamannya berjualan dengan retribusi yang sangat murah dan tidak memberatkan pedagang dan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Tanah Bumbu sudah dilakukan upaya peningkatan pengelolaan pasar, pasar sungai danau raya yang sebelumnya juga mengalami musibah kebakaran telah mendapat perhatian pemerintah Daerah dengan menggabungkan anggaran untuk perbaikan pasar selain itu juga telah diberikan bantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2020

Kata kunci : *Implementasi, Kebijakan Pelayanan Publik dan Penataan Pasar Tradisional*

The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of service policies in the arrangement of traditional markets in Tanah Bumbu Regency which has been carried out at this time and to find out and analyze the efforts of the Tanah Bumbu Regency Government in Public Service Policies in Traditional Market Arrangements in Tanah Bumbu Regency.

The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research conducted for 3 (three) months.

The results of the study indicate that the implementation of the Public Service Policy in the Arrangement of Traditional Markets in Tanah Bumbu Regency which has been carried out at this time can be concluded that so far UPT. The Tanah Bumbu Regency Market Management has done a good job supported by complete data and a clean market that is managed and traders will be comfortable selling with very cheap fees and not burdensome to the actors and the efforts of the Tanah Bumbu Regency Government in Public Service Policies in Structuring Traditional Markets in Indonesia. Tanah Bumbu Regency has made efforts to improve market management, the Sungai Danau Raya market which previously also experienced a fire accident has received attention from the Regional government by budgeting a budget for market repairs. In addition, assistance from the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia has also been provided in 2020.

Keywords : Implementation of Public Service Policies and Arrangement of Traditional Markets

PENDAHULUAN

Objek dalam penelitian ini yaitu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Pasar Sungai Danau Raya, peran pasar harus di tingkatkan agar perekonomian warga menjadi kuat hal ini disebabkan sudah mulai masuknya ritel toko modern nasional seperti Alfamart dan Indomart di Kabupaten Tanah Bumbu yang diyakini mengurangi pendapatan masyarakat yang berdagang di pasar tradisional karena banyaknya masyarakat yang memilih berbelanja di toko modern tersebut karena didukung tempat dan sistem pembayaran yang nyaman, untuk itu kedepannya pasar tradisional di Kabupaten Tanah Bumbu harus di buat dan dikembangkan senyaman mungkin untuk aktivitas jual beli, karena pasar tradisional merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.

Kabupaten Tanah Bumbu sendiri pelayanan pasar tradisional diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Dalam pengelolaan pasar di Kabupaten Tanah Bumbu salah satunya Pasar Tradisional Sungai Danau Raya ditangani langsung di bawah UPT. Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Bumbu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian mengenai kualitas pelayanan, dimana penulis menampilkan dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Tanah Bumbu (Studi Kasus Pada Pasar Sungai Danau Raya di Kabupaten Tanah Bumbu).”**

ALAT DAN METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. (Nazir, 2009: 51).

Lokasi Penelitian

Penelitian akan di lakukan pada Pasar Sungai Danau Raya Jl. Rajawali, Satui, Sungai Danau, Kec. Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72275.

Kajian Literatur

Kebijakan Publik

Laswell dan Kaplan (Nugroho,2014:125), “sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu (*a projected program of goals, values, and praktives*)”.

Menurut Easton (Nugroho, 2014:125) mendefinisikannya, “sebagai akibat

Kemudian Easton (Subarsono, 2016:3) menyatakan, “yang memperlakukan kebijakan publik sebagai instrumen politik untuk mengalokasi nilai-nilai”. Menurut Friederick (Nugroho, 2014:126), “sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Kemudian menurut Koontz dan O’Donnel (Tahir, 2014:21), “kebijakan sebagai pernyataan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan”. Dye (Nugroho, 2014:126) mendefinisikannya, “sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (*public policy is “whatevergovernment choose to do or not do. Public policy is what government do, why they do it, and what difference it makes”*)”.

Menurut Anderson (Tahir, 2014:21), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan publik, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Implikasi Kebijakan Publik

Andreson (Waluyo, 2007:42) menambahkan, terdapat implikasi implikasi dari adanya pengertian kebijakan negara tersebut yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan

- tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
 3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
 4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
 5. Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa.

Selanjutnya menurut Nugroho (2014:129), kebijakan (policy) adalah an authoritative decision. *Decision made by the one who hold the authority. Formal or informal.* Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi, "publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, atau sekedar stakeholders. Publik juga adalah a *sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exist.* Jadi, *public policy adalah: "any of State or Government (as the holder of the authority) decision to manage public life (as the sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, nation is consist of two institutions: state and society)"* Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah: setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan".

Menurut Jones (Waluyo, 2007:43), kebijakan sering digunakan dan dipertukarkan dengan tujuan (*goal*), program (program), keputusan (*decision*), hukum (*law*), proposal (proposal) dan maksud besar tertentu (*the large certain goal*)." Hamdi (2014:33) menyatakan, "kebijakan publik adalah output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan negara, di samping hasil berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik."

Sedangkan Heinz dan Kenneth (Waluyo, 2007:43), "mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut".

Kemudian menurut Mulyadi (2015:37), "kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu".

Mulyadi (2015:37) menambahkan, kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi".

Menurut Rose (Hamdi, 2014:36), “mengartikan kebijakan (*policy*) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan”.

Menurut Soenarko (Syahida, 2014:12), “kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat”.

Sedangkan Kapioru (2014:104) mengemukakan, kebijakan diasumsikan sebagai suatu “pesan” dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok:

- a. Isi kebijakan (*the content of the policy message*).
- b. Format kebijakan (*the form of the policy message*).
- c. Reputasi aktor (*the reputation of the communicators*).

Kemudian menurut Meter dan Horn (Syahida, 2014:11), “kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian, komponen ketiga dari suatu kebijakan, yaitu cara, merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponennya yang pertama, yakni tujuan dan sasaran khusus. Cara ini biasa disebut sebagai implementasi, Misalnya, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Kegiatan implementasi ini baru dilakukan setelah kebijakan memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi sumberdayanya juga disetujui.

Karniawati (2010:6) menyatakan, “kebijakan adalah sebuah mata rantai yang saling terikat dan saling ketergantungan satu dengan lainnya dimana keterkaitan tersebut disera-herkan kepada masyarakat sebagai objek dari kebijakan untuk melaksanakan kebijakan atau tidak melaksanakan tersebut”.

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian Implementasi

Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Meter dan Carl (Pratama, 2013:230) memaparkan, bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Dan menurut Lester dan Stewart (Nastia, 2014:201), “menyatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”.

Model dan Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2014:42), dalam memahami kebijakan publik, terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu :

1. Kontinentalis, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik, ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara.
2. Anglo-Saxonis, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik.

Pengertian Pasar Tradisional

Pasar Tradisional

Menurut Wicaksono dkk. (2011) pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal dan kurang ditemui barang impor, karena barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun kualitasnya relatif sama dengan pasar modern.

Dari segi harga, pasar tradisional tidak memiliki label harga yang pasti karena harga yang pasti karena harga disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik usaha sendiri-sendiri. Selain itu, harga pasar selalu berubah-ubah, sehingga bila menggunakan label harga lebih repot karena harus mengganti-ganti label harga sesuai dengan perubahan harga yang ada di pasar (Dewi dan Winarni, 2011) Pasar tradisional di pedesaan juga terhubung dengan pasar tradisional di perkotaan yang biasa menjadi sentral kulakan bagi pedagang pasar – pasar pedesaan dan di sekitarnya. Pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi masyarakat. Saat ini pasar tradisional tengah mengalami banyak tantangan.

Persaingan menjadi tidak seimbang karena perbedaan modal antara pedagang di pasar tradisional dengan pasar modern (Masitoh, 2013). Namun pasar

tradisional juga memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan pasar modern. Kelebihan tersebut diantaranya adalah:

1. Di pasar tradisional pembeli dapat melakukan tawar menawar harga dengan pedagang.
2. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau.
3. Secara budaya pasar tradisional merupakan tempat publik dimana terjadi interaksi sosial (Masitoh, 2013).

Metode Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain Moleong (2011:234)

Berdasarkan pendapat Bodgan dan Taylor sebagaimana telah dikutip oleh Lexy Moleong mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dari tema dan hipotesis kerja itu Moleong (2011:280)

Data yang diperoleh, dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh adalah dengan cara deskriptif (non statistik), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan. Yang bermaksud mengetahui keadaan sesuatu yaitu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana, dan sebagainya.

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Penelitian deskriptif dibedakan dalam dua jenis penelitian menurut sifat-sifat analisa datanya, yaitu riset deskriptif yang bersifat eksploratif, dan riset deskriptif yang bersifat developmental Arikunto (2012:195).

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data peneliti menggunakan beberapa tahapan teknik analisis data yang dimulai dari pengumpulan data yang peneliti gali melalui wawancara dengan UPT. Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Bumbu pada Pasar Sungai Danau Raya dan Pedagang, observasi dan dokumentasi. Pada tahap kedua peneliti mengolah data, mencari data yang penting sesuai dengan tema yang mendukung untuk proses penelitian berikutnya. Pada tahap ketiga yaitu penyajian data yang telah melalui proses pengolahan data (reduksi data) untuk disajikan dengan fokus penelitian. Tahap terakhir yaitu peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah disajikan atau mencari poin-poin penting agar mudah dipahami.

Proses analisis data yang dilakukan peneliti adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Reduksi Data Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transparansi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data

dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara Miles dan Huberman (2011:21-23).

2. Penyajian Data (Display Data) Penyajian data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian narasi serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel, rumus, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam, maupun dokumentasi. Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosok lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilih-pilih dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.
3. Simpulan Data / Verifikasi Verifikasi data merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat tentatif, kabur, dan diragukan, maka dengan bertambahnya data, menjadi lebih grounded. Kegiatan ini merupakan proses memeriksa dan menguji kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir didapat sesuai dengan fokus penelitian. Simpulan awal yang telah dirumuskan dicek kembali (verifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya menuju ke arah simpulan yang mantap. Simpulan merupakan intisari dari hasil penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir peneliti. Simpulan ini diharapkan memiliki relevansi sekaligus menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian data yang telah terkumpul, kemudian disimpulkan dan ditafsirkan, sehingga terdapat berbagai masalah yang timbul dapat diuraikan dengan tepat dan jelas Surakhman (2011;129) Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif maka analisa datanya dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dimana data tersebut dianalisa secara cermat dan teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Tanah Bumbu

1. Kondisi lingkungan, kondisi lingkungan saat ini pada Pasar Sungai Danau Raya Kabupaten Tanah Bumbu sudah baik dan bersih, kedepannya hanya perlu terus peningkatan lingkungan pasar, saat ini UPT. Pengelolaan Pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu melalui Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah maksimal melakukan Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Tanah Bumbu dengan memberikan perhatian khusus untuk peningkatan pembangunan serta mengusulkan permohonan

permintaan dana kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia dan berhasil diberikan sehingga upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Tanah Bumbu bisa lebih maksimal, mengingat jika hanya dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentu tidak akan maksimal dan Pasar Sungai Danau Raya yang menjadi objek dalam penelitian ini sempat mendapat musibah kebakaran dan sudah bisa diatas sehingga pedagang dapat normal kembali berjualan dengan harapan ekonomi masyarakat semakin meningkat

2. Hubungan antar organisasi, hubungan yang terjalin antar organisasi baik UPT. Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Bumbu dengan pedangang serta Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kementerian Perdagangan selama ini sudah sangat baik terbukti telah diberikannya bantuan untuk peningkatan pasar yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu
3. Sumber daya, sumber daya manusia saat ini sudah cukup semua pekerjaan sudah bisa dikerjakan dengan baik, baik pegawai yang ada di kantor maupun dilapangan namum pada pegawai kantor masih kekurangan dan perlu pegawai IT untuk mendukung menjadi pasar digital, kedepannya perlua penambahan pegawai serta peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti diberikan pelatihan secara berkala agar peningkatan kualitas kerja terus bertambah.
4. Karakter institusi implementor, pimpinan sebagai implementor dari Dinas dan UPT. Pengelolaan Pasar harus mampu menjadi pemimpin yang berkaraket dengan bertugas dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat luas dan pedangang dalam pengelolaan pasar

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Tanah Bumbu kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah dilakukan saat ini dapat simpulkan bahwa selama ini :
 - 1) Kondisi Lingkungan
Secara georafi Pasar Sungai Danau raya memiliki lokasi yang strategi, cukup luas dan los los pasar tertata dengan blok jenis jualan yang berbeda serta perlu peningkatan secara berkala karena ada beberapa bangunan yang sudah tua dan saluran air serta jalan yang kurang baik.
 - 2) Hubungan antar organisasi
Hubungan organisasi UPT. Pengelolaan Pasar selaku unit yang menangani Pasar Sungai Danau Raya dalam kebijakannya saat selalu berkoodinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu dalam setiap pekerjaan selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki hubungan yang baik dengan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.

- 3) Sumber daya

Sumber Daya Manusia UPT. Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 15 (lima belas) pegawai namun didominasi petugas kebersihan dan keamanan serta non PNS sedangkan pegawai kantor masih di rasa kurang karena hanya ada 6 (enam) orang 2 (dua) pejabat yaitu saya sebagai kepala UPT dan Kasubag TU sedangkan pelaksana hanya ada 4 (empat) orang untuk menunjang kebijakan publik pada Pasar Tradisional di Kabupaten Tanah Bumbu tentunya masih kurang kita masih perlu beberapa orang pelaksana khususnya saat ini yang berkeahlian IT untuk mendukung pasar tradisional Sungai Danau Raya.
- 4) Karakter institusi implementor

Selaku implementor pada Pasar Tradisional Sungai Danau Raya selalu merencanakan pasar untuk berkembang baik secara fisik dan pemasarannya yang akan kita kembangkan dengan cara digital.
2. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :
 - 1) Kondisi Lingkungan

UPT. Pengelolaan Pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu melalui Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah maksimal melakukan Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Tanah Bumbu dengan memberikan perhatian khusus untuk peningkatan pembangunan serta mengusulkan permohonan permintaan dana kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia dan berhasil diberikan sehingga upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Tanah Bumbu bisa lebih maksimal.
 - 2) Hubungan antar organisasi

Hubungan antar organisasi, hubungan yang terjalin antar organisasi baik UPT. Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Bumbu dengan pedagang serta Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kementerian Perdagangan selama ini sudah sangat baik terbukti telah diberikannya bantuan untuk peningkatan pasar yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.
 - 3) Sumber daya

Sumber daya, sumber daya manusia saat ini sudah cukup semua pekerjaan sudah bisa dikerjakan dengan baik, baik pegawai yang ada di kantor maupun dilapangan namun pada pegawai kantor masih kekurangan dan perlu pegawai IT untuk mendukung menjadi pasar digital, kedepannya perlu penambahan pegawai serta peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti diberikan pelatihan secara berkala agar peningkatan kualitas kerja terus bertambah.
 - 4) Karakter institusi implementor

Karakter institusi implementor, pimpinan sebagai implementor dari Dinas dan UPT. Pengelolaan Pasar harus mampu menjadi pemimpin yang berkaraket dengan bertugas dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat luas dan pedagang dalam pengelolaan pasar

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, .2012. *Evaluasi Pembelajaran .Prinsip, Teknik, dan Prosedur*), Cetakan Kedelapan, Rosda Karya. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi .2012. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi. Revisi VI, PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Budi Winarno, 2012. *Teori Kebijakan Publik*. Pusat Antar. Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Furchan, Ahmad .2012. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Leo Agustino .2009. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung.
- Mahathir Muhammad Iqbal. 2017. *Implementasi Kebijakan Tentang Penataan, Pembinaan, Dan Pengelolaan Pasar Tradisional Serta Toko Modern*. <http://www.riset.unisma.ac.id/> diakses 19 mei 2021.
- Miles dan Huberman .2011. *Qualitative Data Analysis*. (terjemahan). UI Press. Jakarta.
- Moleong .2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyadi, Deddy .2015 *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta. Bandung.
- Nugroho, Riant .2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka. Pelajar. Yogyakarta,
- Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
- Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Pratama, 2015. *Menata kota melalui rencana detail tata ruang*. (RDTR), Yogyakarta.
- Pryda r. Hutasoit. 2018. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Pasar Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. <http://repositori.usu.ac.id/> diakses 19 mei 2021.
- Syahida, Agung, Bayu. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang* (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).
- Tahir, Arifin 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintah Daerah*. Alfa Beta. Bandung.
- Taufik dan Isril, 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.
- Wahyu Savitri. 2016. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional Di Kota Semarang*. <https://ejournal3.undip.ac.id/> diakses 19 mei 2021.

Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi). Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandarmaju. Bandung.